

implementation: communication, resources, disposition, bureaucratic structure. Research results show that implementation is doing quite well, especially in terms of policy communication, disposition, and bureaucratic structure. However, there are some obstacles, such as inconsistencies in the delivery of policy information and not optimal resource fulfillment. The supporting factors are cooperation between educators and education as well as adequate teacher qualifications. The inhibitory factors are the lack of qualified human resources as well as the lack of adequate facilities and infrastructure.

PENDAHULUAN

Eksistensi manusia di bumi seiring sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan adalah salah satu bentuk perkembangan ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai yang turun menurun di ajarkan oleh orangtua dan pihak lain seiring dengan perkembangan jaman. Pendidikan juga sebuah upaya seseorang dalam keselarasan kemampuan dalam diri dan pada di luar dirinya. Proses keselarasan tersebut merupakan sebuah keharusan dalam kebutuhan bertahan hidup seseorang (Mohammad, 2017)

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional diharapkan menjadi pilar sosial yang tangguh dan dihormati. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang unggul, sehingga mereka dapat beradaptasi dan berperan aktif dalam menghadapi dinamika perubahan yang terus terjadi di berbagai era. Pemerintah memiliki peran penting dalam mempengaruhi setiap aspek pembangunan (Abdi & Ananiah, 2017), termasuk dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Namun, kenyataannya, hingga saat ini standar kualitas pendidikan belum dapat terpenuhi dengan optimal. Kesenjangan pendidikan antar satu daerah dengan yang lainnya adalah tantangan yang utama di hadapi di Indonesia. Sebagai solusi, peningkatan anggaran pendidikan sudah di mulai sejak tahun 2009 dengan besaran presentase 20% dari keseluruhan biaya APBN. Pada periode selanjutnya, dalam rentang tahun 2013 sampai 2021 terjadi peningkatan sebesar 39,56 % (Amalia, 2023). Dampak dari peningkatan anggaran pada dunia pendidikan indonesia adalah dari defisit rasio siswa dengan guru, peningkatan kesejahteraan guru, dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah (Muttaqin, 2018)

Meskipun demikian, berbagai yang mengukur hasil belajar siswa masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Berbagai evaluasi terkait hasil belajar menunjukkan bahwa standar pendidikan di Indonesia masih masuk dalam kategori rendah. Perihal ini, proses belajar mengajar di Indonesia masih masuk dalam kategori krisis. Kedepan apabila hal ini tidak segera teratasi akan membuat penguatan pernyataan Pritchett yang menyatakan bahwa bersekolah tidak sama dengan belajar indikator (Hartoyo & Rahmadayanti, 2022; Mesiono et al., 2022)

Krisis dalam sistem pembelajaran yang telah berlangsung cukup lama semakin parah dengan datangnya kasus pandemi Covid-19, yang dalam hal ini merubah segala sendi kehidupan dan pendidikan di Indonesia. Transformasi dalam proses belajar mengajar di masa pandemi berdampak pada perubahan sistem tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh dan meningkatnya kesenjangan dalam pembelajaran. Kesenjangan yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia sebenarnya sudah terjadi lama dan mengalami penguatan di masa pandemi. Kemendikbud dalam surveynya memberikan pernyataan dalam memanfaatkan gadget dalam proses pembelajaran yang melibatkan daerah 3T dan non-3T memiliki perbedaan yang nyata (Kemendikbudristek, 2021) Hal ini di amini oleh hasil penelitian The SMERU Research Institute, (2020) yang menunjukkan perbedaan aplikasi digital yang digunakan oleh siswa yang ada di kota dan di desa terutrama di luar pulau Jawa.

Berbagai langkah telah diambil untuk menangani isu learning loss dan learning gap, salah satunya dengan mengimplementasikan standar mutu pendidikan baru di Indonesia yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang muncul setelah pandemi Covid-19. Standar mutu pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Cakupan dalam perwujudan peraturan standart nasional pendidikan adalah, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar sarana serta prasarana. Dari kedelapan standar tersebut, standar proses adalah salah satu standar terpenting yang memegang peranan penuh pelaksanaan standart pendidikan di Indonesia. Standar proses merujuk pada norma yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran yang baik dengan tujuan mencapai kompetensi lulusan yang berkualitas (NELI, 2023).

SD Negeri Gondangwetan adalah salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, SD Negeri Gondangwetan berupaya menerapkan standar pendidikan yang ada dalam perwujudan tujuan pendidikan nasional yakni “manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai 8 Standar Pendidikan Nasional di SD Negeri Gondangwetan belum berjalan optimal. Berdasarkan Rekapitulasi pelaksanaan standar, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang ada pada masing-masing pada pemenuhan standar Standar Pendidikan Nasional di SD Negeri Gondangwetan. Mengetahui berbagai hal yang telah penulis deskripsikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi PP No. 4 Th 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri Gondangwetan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian mendalam tentang keadaan atau prosedur yang diteliti dilakukan dalam pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini. (Sugiyono, 2018). Dalam hal ini, menggali data secara mendalam dan mampu mendeskripsikan secara detail tentang Implementasi PP No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri I Gondangwetan. Peneliti menetapkan wilayah tersebut karena merupakan salah satu sekolah yang menjalankan Kurikulum Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa dalam pengimplementasian 8 Standar Nasional Pendidikan Nasional masih menemui berbagai macam permasalahan. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada teori implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Pengambilan sampel secara purposif merupakan metode pemilihan informan yang memperhitungkan penguasaan dan kedalaman informasi. Kepala sekolah, ketua komite sekolah, dan banyak instruktur termasuk di antara informan penelitian. Triangulasi, pencatatan, observasi, dan wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut teori analisis interaktif Miles dan Huberman, pemrosesan data penelitian ini dibagi menjadi empat tahap: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi PP No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri Gondangwetan

1. Komunikasi Kebijakan.

a) Transmisi

Transmisi adalah Saluran yang digunakan dalam transmisi informasi pembuat kebijakan kepada mereka yang melaksanakannya. distribusi data kebijakan Implementasi PP No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri Gondangwetan di sosialisasikan langsung oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Isi sosialisasi mencakup penjelasan 8 standart nasional pendidikan yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar sarana dan prasarana. Masing masing memiliki indikator yang di atur dalam turunan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

b) Indikator Kejelasan

Kejelasan masing-masing instruksi dalam menjalankan implementasi PP No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan harus berjalan lancar dan mampu mengatasi segala salah paham dalam pelaksanaannya. instruksi dalam penyampaian informasi terkait Stndar Nasional Pendidikan Sudah Cukup Jelas. Kejelasan tersebut meliputi penyampaian pengertian dari standar nasional Pendidikan yang merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. lalu penjelasan tentang 8 indikator standart nasional Pendidikan yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar sarana dan prasarana. Lalu terakhir mengenai penerapan standar nasional Pendidikan di lingkup sekolah. Seluruh penjelasan materi tersebut terangkum dalam penjelasan bapak Hadi Sukamto, S.Pd.,M.Si selaku kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Penyampaian materi tentang standar nasional Pendidikan dapat di konsultasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

apabila masih terdapat kendala dalam pemahaman standar nasional Pendidikan ini.

c) Konsistensi

Konsistensi merupakan keajegan dari setiap kebijakan yang sedari awal tidak mengalami perubahan dalam menjalankan kebijakan tersebut konsistensi instruksi dalam penerapan standar Nasional Pendidikan di SD Negeri Gondangwetan belum berjalan dengan baik dan konsisten. Pasalnya setiap peraturan sampai saat ini telah mengalami perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan ke Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Perubahan tersebut mencakup mengenai beberapa hal yakni Standar Kompetensi Lulusan, Kurikulum, dan juga akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian Budaya Riset dan Teknologi. Perubahan tersebut membuat SD Negeri Gondangwetan merubah beberapa kebijakannya salah satunya tentang standar kompetensi lulusan dan kurikulum yang telah di tetapkan

2. Sumber Daya

Dalam hal penerapan kebijakan, sumber daya sangatlah penting. Sumber daya ini meliputi gedung, informasi, wewenang, dan sumber daya manusia yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kebijakan secara efisien. (Sutrisno, 2016). Sumberdaya manusia dalam melaksanakan Implementasi PP No. 4 Tahun Tentang Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri Gondangwetan adalah seluruh perangkat sekolah yakni guru yang berjumlah 7 orang dan tenaga kependidikan sejumlah 3 Orang.

Sumber daya informasi dalam pelaksanaan PP No. 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan mengalami kendala yaitu adanya salah paham karena tidak seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengetahui seluruh standar nasional pendidikan yang ada. Dari 8 indikator, para tenaga pendidik hanya mengetahui 3-4 standar. Standar yang diketahui pada umumnya adalah Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar penilaian pendidikan. Selebihnya seperti standar pengelolaan, pembiayaan, dan sarana prasarana para tenaga pendidik tidak mengetahuinya.

Wewenang Implementasi Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri Gondangwetan di berikan sejak lama. Peraturan awal tentang standar nasional pendidikan ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan lalu diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. karena di anggap belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan dirubah kembali PP No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya bangunan, tanah, dan fasilitas lain yang mendukung penyediaan layanan implementasi kebijakan merupakan contoh sumber daya fasilitas, yang merupakan mekanisme operasionalisasi implementasi kebijakan. Edward menggarisbawahi bahwa kurangnya fasilitas akan membuat pelaku kebijakan tidak mungkin memperoleh informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipercaya, yang akan berujung pada kegagalan implementasi kebijakan. SDN Gondangwetan memiliki 13 ruangan yang terdiri dari Ruang Kelas, Perpustakaan, Ruang Guru, Toilet dan Ruang bangunan yang di gunakan sebagai sarana prasarana penunjang seluruh siswa dan perangkat sekolah yang ada di SD Negeri Gondangwetan.

Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SDN Gondangwetan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah. Sehingga dalam hal ini perlu pengembangan sarana dan prasarana selanjutnya

3. Disposisi

a) Efek Disposisi dan Pengaturan Birokrasi

Disposisi atau sikap para pelaksana melaksanakan kebijakan yang diinginkan pejabat tinggi, sikap atau watak pelaksana sebenarnya akan mempersulit pelaksanaan kebijakan personalia saat ini. Untuk itu pemilihan para pelaksana dalam menerapkan pola menjadi hal yang sangat penting.

Efek Disposisi dan pengaturan dalam menjalankan PP No. 4 tahun 2022 tentang standart nasional pendidikan di SD Negeri Gondangwetan berjalan cukup baik

namun ditemukan beberapa catatan yang masih perlu di perbaiki dari 8 standar yang dilakukan oleh seluruh perangkat sekolah.

Pelaksanaan standar isi di SD Negeri Gondangwetan didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022, belum sepenuhnya optimal karena muatan wajib dan konsep keilmuan belum menyesuaikan perkembangan terbaru. Standar proses berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 juga masih perlu perbaikan, terutama pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian belajar, yang ditandai dengan penurunan kompetensi siswa.

Kompetensi lulusan SD Negeri Gondangwetan sudah memenuhi standar 100%, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022. Dalam hal standar penilaian pendidikan, sekolah telah menyesuaikan dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022. Namun, standar tenaga kependidikan masih belum terpenuhi sepenuhnya karena ada guru yang belum memiliki kualifikasi sesuai ketentuan Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022.

Standar pengelolaan pendidikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Standar pembiayaan juga sudah dikelola dengan baik berdasarkan Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023. Namun, dalam hal sarana dan prasarana, SD Negeri Gondangwetan masih belum memenuhi standar yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023.

b) Insentif

bentuk apresiasi kinerja atau insentif khusus pada kinerja standart nasional pendidikan di SD Negeri Gondangwetan tidak ada. Namun anggaran untuk pengelolaan sekolah sesuai standart nasional berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jumlah nominal Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2023 adalah sebesar 172.896.432 (Laporan Keuangan Sekolah, 2023). Besaran biaya operasional sekolah tersebut hanya bersumber pada dana BOS karena tidak di perkenankan meminta pungutan dan iuran dari siswa atau wali murid.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat dipengaruhi oleh organisasi birokrasi. Struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit organisasi saat ini, dan

hubungan organisasi dengan organisasi luar merupakan komponen struktur birokrasi. Struktur Birokrasi di bagi 2 karakteristik yakni membuat SOP dan melaksanakan fragmentasi.

Standar operasional prosedur sesuai aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan dirubah kembali PP No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan tersebut mencakup perubahan kurikulum sekolah dasar yang membuat adalah pihak kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi dan standar kompetensi lulusan. Dalam Fragmentasi, SD Negeri Gondangwetan untuk menjalankan setiap tugasnya membagi tugas yang di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi PP No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri Gondangwetan.

1. Faktor Penghambat

Pelaksanaan Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 di SD Negeri Gondangwetan terhambat oleh ketiadaan guru mata pelajaran yang berkualifikasi baik. Hal ini berdampak negatif pada proses belajar mengajar, karena jika guru tidak hadir, siswa sering kali diajar oleh guru lain yang tidak sesuai bidangnya atau hanya diberi tugas mandiri. Metode ini tentu tidak efektif dan menghambat pencapaian tujuan pembelajaran, karena siswa tidak mendapatkan bimbingan yang memadai.

Selain itu, sekolah juga menghadapi kendala kekurangan sarana dan prasarana yang memadai. Dari total 13 ruangan yang ada, meskipun mencakup ruang kelas, perpustakaan, dan ruang guru, masih banyak fasilitas penting yang belum tersedia, seperti ruang UKS, laboratorium, dan ruang tata usaha. Kekurangan fasilitas ini membuat proses belajar mengajar tidak berjalan optimal dan menghambat upaya sekolah dalam mencapai standar pendidikan yang diharapkan.

2. Faktor Pendukung

Pelaksanaan kurikulum di SD Negeri Gondangwetan didukung oleh kerjasama yang baik antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Semua perangkat sekolah berupaya menjalankan pengelolaan sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PP No. 4 Tahun 2022. Jika ada aspek yang belum sesuai standar,

mereka bersama-sama menyesuaikan untuk memastikan tidak ada dampak buruk terhadap perkembangan pendidikan siswa.

Selain itu, kualifikasi guru kelas yang memadai juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kurikulum. Guru berperan sebagai aktor utama yang menjalankan tugas pengajaran dan administratif dengan baik. Mereka memegang peranan besar dalam memastikan implementasi kebijakan pendidikan berjalan sesuai standar, yang berdampak positif bagi perkembangan siswa di SD Negeri Gondangwetan.

KESIMPULAN

Implementasi PP No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri Gondangwetan berjalan cukup baik, terutama dalam hal komunikasi kebijakan, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, ada beberapa kendala, seperti inkonsistensi dalam penyampaian informasi kebijakan dan belum optimalnya pemenuhan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, informasi, dan fasilitas. Faktor pendukung yang signifikan adalah kerjasama antara tenaga pendidik dan kependidikan serta kualifikasi guru yang memadai. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi serta kekurangan sarana dan prasarana yang memadai.

Saran

Sebagaimana di jelaskan pada bagian kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Perlu adanya penambahan Jumlah Guru yang memiliki kualifikasi sesuai perkembangan pendidikan.
2. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pelayanan pendidikan siswa di SD Negeri Gondangwetan.
3. Perlu adanya perubahan pendekatan Guru dalam upaya peningkatan kompetensi siswa

REFERENSI

- Abdi, M. I., & Ananiah, A. (2017). Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada Sekolah-Sekolah Unggulan di Samarinda. *Fenomena*, 9(1), 83. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.858>
- Amalia, I. D. (2023). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN FIQIH DI MAN 1 NGANJUK. In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*.
- Hartoyo, A., & Rahmadayanti, D. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2247–2255.
- Kemendikbudristek. (2021). Kurikulum Untuk Pemulihan Pembelajaran. In *Kajian Akademik*.
- Mesiono, R. H., Mz, I., Nasution, A. S., & Siregar, A. H. (2022). Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Pendidikan Dasar dan Menengah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12095–12105.
- Mohammad, S. (2017). *Personal branding guru : meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru* (M. Sandra. & Ed), Eds.). Ar-Ruzz Media.
- Muttaqin, T. (2018). Determinants of Unequal Access to and Quality of Education in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(1), 1–23. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.27>
- NELI, H. (2023). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR MATA PELAJARAN KE-NU-AN KELAS XI DI SMK MA'ARIF NU 1 AJIBARANG BANYUMAS. In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana.
- The SMERU Research Institute. (2020). Memulihkan penurunan kemampuan siswa saat sekolah di Indonesia dibuka kembali. *The RISE Programme in Indonesia*.